

Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia

by Irene Septia Fada

Submission date: 03-Jun-2024 10:31PM (UTC-0500)

Submission ID: 2395097400

File name: SRJ_-VOLUME._2_NO._3_JUNI_2024_hal_82-92.docx (49.45K)

Word count: 3244

Character count: 22175

Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia

6 Irene Septia Fada¹
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ireneseptiafada99@gmail.com

6 Achmad Tanthowi²
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
achmadtanthowi4@gmail.com

11 Dwi Noviani³
Institut Agama Islam Al-Qur'an & Ittifaqiah Indralaya
dwi.noviani@iaiqi.ac.id

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km. 3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30126
9 Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

Abstract. This research explores the impact of globalization and modernization on inheritance law in Indonesia, a fundamental legal aspect of the socio-economic life of society. Globalization introduces international legal values and principles that interact with national laws, driving more inclusive and equitable reforms. On the other hand, legal modernization aims to update and simplify inheritance law procedures and regulations, making them more relevant and accessible in the digital age. Using qualitative methods with a descriptive analytical approach, this research analyzes data from legal literature, legislation, and interviews with legal practitioners and academics. The findings show that globalization and modernization have a significant impact, ranging from aligning inheritance laws with international standards to increasing efficiency through digitalization. However, this process also faces challenges such as cultural resistance and infrastructure issues. This article concludes that while globalization and modernization present significant opportunities to enhance justice and accessibility in inheritance law, a sensitive adaptation to the local context is essential to ensure broad acceptance and effective implementation.

Keywords : Globalization, Modernization, Inheritance law

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh globalisasi dan modernisasi terhadap hukum waris di Indonesia, sebuah aspek hukum yang fundamental bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Globalisasi memperkenalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berinteraksi dengan hukum nasional, mendorong reformasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Modernisasi hukum, di sisi lain, berupaya untuk memperbarui dan menyederhanakan prosedur serta regulasi hukum waris, menjadikannya lebih relevan dan mudah diakses di era digital. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menganalisis data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan praktisi hukum serta akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi dan modernisasi memberikan dampak signifikan, mulai dari penyesuaian hukum waris dengan standar internasional hingga peningkatan efisiensi melalui digitalisasi. Namun, proses ini juga menghadapi tantangan berupa resistensi budaya dan masalah infrastruktur. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun globalisasi dan modernisasi menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan keadilan dan aksesibilitas hukum waris, adaptasi yang sensitif terhadap konteks lokal tetap diperlukan untuk memastikan penerimaan yang luas dan implementasi yang efektif.

Kata Kunci : Globalisasi, Modernisasi, Hukum Waris

PENDAHULUAN

Globalisasi dan modernisasi telah menjadi kekuatan pendorong yang signifikan dalam transformasi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia, termasuk sistem hukum. Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya dan tradisi hukum yang kompleks, tidak luput dari pengaruh dua fenomena ini. Globalisasi, dengan arus informasi dan interaksi internasional yang cepat, telah memperkenalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berinteraksi dengan hukum nasional. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengadaptasi regulasi-regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan standar internasional. Modernisasi hukum, di sisi lain, menuntut pembaruan dan penyederhanaan prosedur serta regulasi hukum agar lebih relevan dan mudah diakses oleh masyarakat luas, khususnya di era digital yang berkembang pesat.

Hukum waris merupakan salah satu aspek hukum yang fundamental bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Di Indonesia, hukum waris diatur oleh berbagai sistem hukum, termasuk hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Setiap sistem memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda, mencerminkan keragaman budaya dan nilai-nilai lokal. Namun, dengan meningkatnya interaksi global dan perubahan sosial-ekonomi yang cepat, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan dan memodernisasi hukum waris agar dapat memenuhi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Proses globalisasi dan modernisasi ini tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan yang signifikan.

Dalam konteks globalisasi, Indonesia harus menyesuaikan hukum warisnya dengan konvensi internasional dan praktik terbaik dari berbagai negara. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip keadilan gender, perlindungan hak anak, dan keadilan sosial dalam distribusi harta waris. Modernisasi hukum waris juga melibatkan pengembangan teknologi hukum, seperti digitalisasi dokumen dan layanan hukum online, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Namun, perubahan ini sering kali menghadapi resistensi dari masyarakat yang masih kuat memegang tradisi lama dan menghadapi tantangan infrastruktur yang belum memadai di banyak daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak globalisasi dan modernisasi terhadap hukum waris di Indonesia, dengan menyoroti perubahan regulasi, adaptasi prosedur, dan tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan praktisi hukum dan akademisi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum

waris di Indonesia berevolusi dalam menghadapi dinamika global dan tuntutan modernitas, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan sistem hukum waris yang lebih adil dan efisien.

8 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal hukum, buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik. Analisis dilakukan terhadap perubahan-perubahan regulasi dan praktik hukum waris dalam konteks globalisasi dan modernisasi. Data juga diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum dan akademisi untuk memperoleh perspektif praktis dan teoretis mengenai dampak globalisasi dan modernisasi terhadap hukum waris di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Waris

Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antarbangsa yang ditandai oleh arus informasi, teknologi, perdagangan, dan budaya yang melintasi batas negara. Dalam konteks hukum, globalisasi mengarah pada penyebaran ide-ide, nilai-nilai, dan standar hukum yang dapat mempengaruhi dan membentuk sistem hukum nasional. Artinya globalisasi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana aktivitas manusia menjadi semakin global dan saling terhubung, tanpa terbatas oleh batasan wilayah. Sudah menjadi kenyataan bahwa globalisasi menjadi topik yang sering dibicarakan di seluruh dunia sejak awal abad ke-21. Namun, pendapat pro dan kontra selalu mendampingi perkembangan globalisasi sebagai fenomena yang mengubah pola kehidupan masyarakat.

Globalisasi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk hukum waris di Indonesia. Dengan arus informasi yang semakin cepat dan terbuka, masyarakat menjadi lebih terpapar pada konsep-konsep hukum dari berbagai negara. Hal ini mendorong terjadinya pertukaran ide dan praktik hukum yang lebih luas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pembentukan dan pembaruan hukum waris di Indonesia. Globalisasi telah mendorong Indonesia untuk menyesuaikan hukum warisnya dengan standar internasional yang lebih inklusif dan adil. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia, terutama dalam konteks keadilan gender dan hak-hak anak. Misalnya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) menekankan

pentingnya kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum waris. Sebelum terjadinya globalisasi, banyak sistem hukum adat di Indonesia yang memberikan porsi warisan yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan.

Namun, dengan adanya tekanan internasional dan kesadaran yang meningkat tentang keadilan gender, Indonesia mulai menyesuaikan peraturannya untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan hak yang setara dalam pewarisan harta. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada hukum perdata, tetapi juga merambah ke hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Integrasi prinsip-prinsip internasional dalam hukum nasional dapat dilihat dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam putusan-putusan pengadilan terkait sengketa waris. Pengaruh globalisasi juga memaksa pembuat kebijakan untuk lebih mempertimbangkan praktik-praktik terbaik dari berbagai negara dalam reformasi hukum waris, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Meskipun globalisasi membawa perubahan positif dalam penyesuaian hukum waris terhadap standar internasional, implementasi perubahan ini sering kali menghadapi tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya dan tradisi lokal yang sangat kuat di Indonesia. Banyak komunitas adat yang memiliki sistem waris yang telah mereka jalankan selama berabad-abad, dan perubahan yang diimpor dari luar sering kali dianggap mengancam keberlanjutan tradisi tersebut. Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas adat, warisan tanah dan properti lebih cenderung diberikan kepada laki-laki sebagai penerus keluarga, sebuah praktik yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender internasional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif. Pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat lokal dalam proses reformasi hukum. Pendekatan dialogis dan partisipatif dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan terhadap perubahan. Misalnya, adaptasi hukum waris yang memperhitungkan nilai-nilai lokal sambil tetap menghormati prinsip-prinsip internasional dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai manfaat dari kesetaraan gender dan keadilan dalam distribusi harta waris dapat membantu mengubah persepsi masyarakat secara bertahap.

Modernisasi Hukum Waris

Modernisasi berasal dari kata "modern" yang berarti terkini, terbaru, serta sikap dan pemikiran yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ini adalah suatu proses di mana masyarakat mengalami perubahan dalam sikap dan pola pikir agar dapat hidup sesuai dengan kebutuhan

zaman saat ini. Menurut Nurcholis Majid, modernisasi identik dengan rasionalisasi, yang merupakan proses adopsi pola pikir dan metode kerja baru yang logis, dengan menggunakan inovasi terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga, sesuatu dianggap modern jika memiliki sifat rasional, ilmiah, dan sesuai dengan hukum alam. Dengan demikian, modernisasi dapat dianggap sebagai upaya sadar dari suatu bangsa, masyarakat, atau negara untuk beradaptasi dengan perubahan zaman menggunakan pengetahuan yang lebih maju.

Sedangkan modernisasi hukum waris adalah sebuah proses yang tidak hanya berfokus pada pembaruan peraturan perundang-undangan tetapi juga pada transformasi sistemik yang melibatkan berbagai elemen dalam administrasi dan pelaksanaan hukum. Proses ini bertujuan untuk menjadikan hukum waris lebih relevan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama di era digital ini. Modernisasi hukum waris di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi hingga reformasi regulasi untuk mengakomodasi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Hal ini termasuk pengadopsian sistem elektronik dalam pengelolaan dokumen waris, peningkatan kapasitas lembaga peradilan, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam konteks pewarisan.

Modernisasi hukum waris di Indonesia tidak hanya berfokus pada revisi peraturan, tetapi juga pada peningkatan prosedur dan aksesibilitas layanan hukum. Salah satu aspek penting dari modernisasi ini adalah digitalisasi sistem hukum waris. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai platform digital untuk mempermudah proses pendaftaran dan pengelolaan dokumen waris. Dengan digitalisasi, proses yang sebelumnya memakan waktu lama dan birokratis kini menjadi lebih cepat dan transparan, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi korupsi. Selain itu, modernisasi hukum waris juga melibatkan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami hak-hak mereka dalam hukum waris, sehingga sering kali terjadi ketidakadilan dalam distribusi harta waris. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) telah menjalankan berbagai program edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Program-program ini mencakup pelatihan, seminar, dan penyebaran informasi melalui media sosial dan platform digital lainnya. Namun, modernisasi ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari masyarakat yang masih kuat memegang tradisi lama. Banyak masyarakat adat yang masih merasa nyaman dengan sistem waris tradisional yang telah mereka jalankan selama berabad-abad. Modernisasi sering kali dilihat sebagai

ancaman terhadap keberlanjutan tradisi ini. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pendekatan yang sensitif dan inklusif, melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam proses reformasi hukum waris agar perubahan yang terjadi dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Tantangan dan Peluang Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris

1. Tantangan Hukum Waris di Era Globalisasi dan Modernisasi

a. Resistensi Budaya

Resistensi Budaya adalah tindakan masyarakat untuk menjaga keunikan budaya mereka dari pengaruh dominasi budaya global yang semakin meluas melalui media dan teknologi informasi. Di tengah kekhawatiran akan kehilangan identitas budaya akibat penyebaran cepat budaya global, resistensi budaya menjadi strategi utama dalam melawan dominasi tersebut. Salah satu tantangan utama dalam mengadaptasi hukum waris di Indonesia adalah resistensi budaya. Indonesia memiliki keragaman budaya yang kaya, dengan hukum adat yang masih sangat kuat di banyak daerah. Setiap kelompok etnis memiliki aturan dan praktik waris yang berbeda, yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional yang lebih modern. Misalnya, dalam beberapa budaya, perempuan mungkin mendapatkan bagian warisan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang diusung oleh hukum internasional.

Resistensi budaya ini bisa menghambat proses harmonisasi hukum waris. Masyarakat yang telah lama mengikuti tradisi mungkin merasa bahwa perubahan dalam hukum waris adalah bentuk ancaman terhadap identitas dan warisan budaya mereka. Oleh karena itu, proses modernisasi hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal, mengedepankan dialog dan partisipasi masyarakat untuk menemukan titik temu antara tradisi dan prinsip-prinsip modern.

b. Infrastruktur dan Teknologi

Modernisasi hukum waris membutuhkan infrastruktur yang memadai dan adopsi teknologi informasi yang luas. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah ketimpangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak daerah di Indonesia yang masih kekurangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, yang menjadi hambatan dalam implementasi sistem hukum yang berbasis digital. Misalnya, penggunaan e-court dan sistem registrasi online memerlukan

21
jaringan internet yang stabil dan fasilitas teknologi yang memadai, yang belum tersedia di semua daerah.

Selain itu, kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi baru juga menjadi tantangan. Banyak aparat hukum dan masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam proses hukum. Pelatihan dan edukasi yang intensif diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam konteks hukum waris. Tanpa dukungan infrastruktur dan kemampuan teknis yang memadai, modernisasi hukum waris akan sulit untuk direalisasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

c. Sinkronisasi Antar-Sistem Hukum

10
Indonesia menganut pluralisme hukum, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata berlaku bersamaan dalam konteks hukum waris. Tantangan utama dalam hal ini adalah bagaimana mensinkronkan ketiga sistem hukum tersebut agar tidak saling bertentangan dan dapat beroperasi harmonis. Misalnya, hukum waris Islam memiliki aturan yang spesifik mengenai pembagian warisan, yang mungkin berbeda dengan hukum adat atau hukum perdata.

Ketidaksinkronan ini sering kali menimbulkan kebingungan dan konflik di kalangan masyarakat yang harus memilih sistem hukum mana yang akan diikuti. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya serius dalam melakukan harmonisasi dan penyusunan regulasi yang dapat mengakomodasi ketiga sistem hukum tersebut. Pendekatan yang inklusif dan dialog antar-pihak terkait sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

2. Peluang dalam Hukum Waris di Era Globalisasi dan Modernisasi

a. Reformasi Hukum yang Inklusif dan Adil

Globalisasi memberikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum waris yang lebih inklusif dan adil. Dengan semakin terbukanya akses terhadap informasi global, masyarakat dan pembuat kebijakan dapat belajar dari praktik-praktik terbaik di negara lain. Prinsip-prinsip internasional mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender dapat diadopsi untuk memperbarui hukum waris di Indonesia.

Reformasi hukum yang inklusif dapat memastikan bahwa semua pihak, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan, mendapatkan perlindungan dan keadilan yang setara. Misalnya, pengakuan hak waris bagi perempuan

dan anak-anak dalam hukum nasional dapat diperkuat, sehingga mereka memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Reformasi ini juga dapat mencakup penyederhanaan prosedur hukum untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan hukum waris.

b. Digitalisasi dan Efisiensi Proses Hukum

Peluang besar lainnya adalah digitalisasi dalam proses hukum waris. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, berbagai proses administrasi dan dokumentasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Sistem e-court, misalnya, memungkinkan pendaftaran kasus, pengajuan dokumen, dan pelaksanaan sidang dilakukan secara online, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa waris.

Digitalisasi juga memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih baik, sehingga informasi mengenai aset dan ahli waris dapat diakses dengan mudah dan cepat. Hal ini sangat penting untuk mencegah sengketa dan memastikan proses pewarisan berjalan lancar. Selain itu, penggunaan teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

c. Peningkatan Kesadaran dan Literasi Hukum

Globalisasi dan modernisasi juga membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran dan literasi hukum di kalangan masyarakat. Dengan akses yang lebih luas terhadap informasi dan pendidikan, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum waris. Program-program edukasi dan kampanye publik dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan waris dan penyusunan dokumen hukum yang sah.

Peningkatan literasi hukum ini akan membantu masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengatur warisan mereka, mengurangi potensi konflik di masa depan. Masyarakat yang lebih teredukasi akan cenderung mencari nasihat hukum yang tepat dan menggunakan layanan hukum profesional untuk memastikan bahwa proses pewarisan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak hanya menguntungkan ahli waris, tetapi juga mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih tertib dan teratur.

KESIMPULAN

Globalisasi dan modernisasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap hukum waris di Indonesia. Dalam konteks globalisasi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum internasional berinteraksi dengan hukum nasional, mendorong reformasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Globalisasi memperkenalkan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang mempengaruhi revisi hukum waris agar lebih adil bagi semua pihak. Meskipun demikian, proses harmonisasi ini tidak tanpa tantangan, terutama resistensi budaya yang kuat dan kesulitan dalam sinkronisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.

Modernisasi hukum waris bertujuan untuk memperbarui dan menyederhanakan prosedur serta regulasi agar lebih relevan dan mudah diakses di era digital. Digitalisasi dalam proses hukum waris membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, melalui pengenalan sistem e-court dan registrasi online. Namun, ketimpangan infrastruktur dan keterbatasan teknologi di berbagai daerah masih menjadi hambatan utama. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi hukum dan teknologi di kalangan masyarakat dan aparat hukum untuk memastikan implementasi yang efektif.

Kesimpulannya, meskipun globalisasi dan modernisasi menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan keadilan dan aksesibilitas hukum waris di Indonesia, adaptasi yang sensitif terhadap konteks lokal tetap diperlukan. Reformasi hukum harus dilakukan dengan pendekatan inklusif yang mengakomodasi keragaman budaya dan sistem hukum yang ada. Pendidikan dan literasi hukum yang ditingkatkan, serta penguatan infrastruktur teknologi, sangat penting untuk mendukung proses modernisasi ini. Dengan demikian, hukum waris di Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era globalisasi dan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2019). Sinkronisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Konteks Pewarisan di Indonesia. *Jurnal Antropologi Hukum*, 11(4), 345-360.
- Asfi Burhanudin, Achmad. (2020). "Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi". *Ejournal Institusi Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri*. Volume 2, Nomor 4.
- Darmawan, R. (2020). Globalisasi dan Reformasi Hukum Waris: Perspektif Komparatif. *Jurnal Hukum Internasional*, 12(3), 221-240.
- Firdaus, N. (2020). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menghadapi Globalisasi Hukum Waris. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 9(2), 145-160.
- Hanafi, N. (2020). Kebijakan Publik dan Pengaruhnya terhadap Hukum Waris. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 125-140.
- Indonesia Digital Law Network, "Tren Digitalisasi Hukum Waris di Indonesia," *Indonesian Legal Review*, Vol. 6, No. 1 (2021): 85-98.
- Indrayana, Denny, "Reformasi Hukum Waris dalam Konteks Globalisasi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 47, No. 3 (2019): 345-358.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Perkembangan Digitalisasi Layanan Hukum di Indonesia," Laporan Tahunan 2022 (2022).
- Lestari, T. (2020). Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Gender dan Hukum*, 8(1), 30-45.
- Mahfud, M. (2019). Digitalisasi Layanan Hukum di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(2), 58-73.
- Mulyadi, A. (2021). Kebijakan Hukum Nasional dalam Menghadapi Globalisasi: Studi Kasus Hukum Waris. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 15(2), 95-110.
- Pratiwi, R. dan Nugraha, Y., "Dampak Globalisasi terhadap Hukum Keluarga di Indonesia: Studi Kasus Hukum Waris," *Journal of Contemporary Indonesian Legal Studies*, Vol. 4, No. 2 (2020): 201-214.
- Putri, F. (2022). Perkembangan Regulasi Hukum Waris di Indonesia dalam Era Globalisasi. *Jurnal Regulasi dan Kebijakan*, 6(4), 235-250.
- Rukminingsih, Gunawan Adnan, dan Mohammad Adnan Latief. *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas)*, ed. oleh Erni Munastiwi dan Havid Ardi. Yogyakarta: Erhaka Utama. (2020).
- Saraswati, I. (2021). Digitalisasi Dokumen Hukum dan Dampaknya pada Efisiensi Hukum Waris. *Jurnal Sistem Informasi Hukum*, 9(1), 45-60.
- Subekti, R. dan Fadli, M., "Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Waris Islam di Indonesia," *Al-Ahkam Journal of Islamic Law*, Vol. 34, No. 4 (2019): 623-636.

- Susanto, D. (2019). Peran Teknologi Informasi dalam Modernisasi Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, 7(3), 210-224.
- Sutrisno, A., "Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Nasional dalam Era Globalisasi," *Journal of Indonesian Law Studies*, Vol. 5, No. 1 (2021): 27-39.
- Wicaksono, A. dan Kurniawan, B., "Pengaruh Modernisasi terhadap Efektivitas Hukum Waris di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 38, No. 2 (2020): 159-172.
- Widodo, H. (2022). Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum*, 13(1), 87-102.
- Yusuf, A. (2020). Harmonisasi Hukum Waris di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 75-92.

Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal-stiyappimakassar.ac.id Internet Source	2%
2	jurnal.anfa.co.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	jonedu.org Internet Source	1%
6	Olan Olan, Abdullah Idi, Ahmad Zainuri, Ari Sandi. "Implementasi Aplikasi Al-Qur'an Digital pada Siswa Kecanduan Gadget", Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 2019 Publication	<1%
7	www.scilit.net Internet Source	<1%

8

Deischa Rizqita Marchellia Rahadian, Agus Garnida, Tengku Sitti Rochmah.

"Implementasi Aplikasi Role Sekretaris Di Era Industri 4.0 Dalam Monitoring Rapat Pada PT Langgeng Sejahtera Kreasi Komputasi", Jurnal Sekretaris & Administrasi Bisnis (JSAB), 2024

Publication

<1 %

9

jurnal-stiepari.ac.id

Internet Source

<1 %

10

pdb-lawfirm.id

Internet Source

<1 %

11

www.prin.or.id

Internet Source

<1 %

12

accurate.id

Internet Source

<1 %

13

Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

14

clipan.co.id

Internet Source

<1 %

15

ejournal.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

pt.scribd.com

16	Internet Source	<1 %
17	spaj.ukm.my Internet Source	<1 %
18	documents1.worldbank.org Internet Source	<1 %
19	e-journal.akpelni.ac.id Internet Source	<1 %
20	id.scribd.com Internet Source	<1 %
21	jabarekspres.com Internet Source	<1 %
22	lagubaratsedih.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
24	www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
25	Utami, Yuni. "Mekanisme Diversi Terhadap Perkara Anak Dalam Proses Penyidikan di Polres Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off